

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Pendidikan Menengah Kejuruan

Victor Della Vos yang mengawali adanya pemikiran yang sistematis dalam pengembangan kurikulum pada pendidikan teknologi dan kejuruan. Della yang merupakan direktur dari “*The Imperial Technical School of Moscow*”, pada tahun 1876 di Philadelphia Cantennia Exposition mengemukakan pendekatan baru dalam pembelajaran teknik, sehingga pada saat itu Della menjadi katalis untuk pendidikan teknik di Amerika Serikat (Lannie, 1971).

Sudira (2016:1) menjelaskan bahwa pada tahun 1999 dalam kongres internasional kedua ILO (*International Labour Organization*) bersama UNESCO (*United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*) yang diadakan di Korea menetapkan konsep pendidikan dan pelatihan teknikal dan kejuruan dengan nama *Techical and Vocational Education and Training* (TVET) untuk pertama kalinya. Negara-negara di Asia Tenggara bahkan saat ini sangat menjadikan perkembangan pendidikan kejuruan sebagai kunci untuk menghadapi permasalahan berupa pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dan sosial di masa depan.

Beberapa negara maju seperti Inggris, Jepang dan Jerman memiliki kebijakan ketat terhadap pendidikan kejuruanya sehingga dalam penerapannya juga

mempengaruhi perekonomian negara yang berkembang dengan pesat. Hal tersebut dikarenakan mereka sangat menyadari bahwa pentingnya bekal pendidikan kejuruan dalam pekerjaan untuk perkembangan ekonomi (Nurhadi & Lyau, 2018: 295). Negara di Asia Tenggara menggunakan istilah *Vocational and Technical Education and Training* (VTET) yang intinya sama dengan TVET. Mereka menekankan pendidikan kejuruan sebagai pendidikan serta pelatihan teknik dan kejuruan.

Di Indonesia, penyelenggaran Sekolah Menengah Kejuruan telah ditentukan pada Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional Bab IV pasal 11 ayat (1) dan (3) dengan isi: “Jenis pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional”. Selanjutnya, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 15 adanya pendidikan kejuruan diperkuat dengan bunyi: “pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.”

Pada tingkatannya, Sekolah Menengah Kejuruan memiliki tingkat yang setara dengan Sekolah Menengah Atas, namun keduanya mempunyai tujuan yang berbeda. Dimana untuk sekolah menengah kejuruan bertujuan mencetak calon tenaga kerja dan sekolah menengah atas bertujuan menyiapkan bekal ke jenjang pendidikan tinggi.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu lembaga pendidikan kejuruan yang memiliki tugas mempersiapkan peserta didik untuk memasuki dunia

kerja. Semua unsur lainnya akan sangat terkait dengan tujuan tersebut. Jika tujuan tidak memiliki tujuan maka semua lainnya akan kabur, tidak terarah, dan tidak terfokus dalam mencapai tujuan tersebut.

Pengertian mengenai sekolah kejuruan terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru pasal 1 ayat (21) yang menyatakan bahwa “Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs”.

Pendidikan kejuruan bukan hanya menyiapkan keterampilan saja, tetapi juga menyiapkan sikap, adaptasi serta kebiasaan yang diterapkan pada dunia kerja. Tuntutan dunia kerja bukan hanya memerlukan tenaga kerja yang berorientasi pada keterampilan saja, akan tetapi juga membutuhkan tenaga kerja yang memiliki sikap positif dalam pekerjaan seperti kerjasama, disiplin, tanggung jawab, loyalitas, kejujuran dan lain-lain.

2. Informasi Perekrutan di Dunia Industri

Menurut Badan Pusat Statistik (2008) industri mempunyai dua pengertian:

- a. Pengertian secara luas, industri mencakup semua usaha dan kegiatan di bidang ekonomi bersifat produktif.
- b. Pengertian secara sempit, industri hanyalah mencakup industri pengolahan yaitu suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang

dasar mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi, kemudian barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih nilainya dan sifatnya lebih kepada pemakaian akhir.

Informasi sangat diperlukan dalam bidang pendidikan. Informasi berperan sebagai pembuka wawasan bagi yang menerima hal tersebut. Dalam bidang pendidikan, informasi berupa materi pembelajaran, himbauan, layanan publik sekolah serta informasi terkait dunia kerja. Salah satu bentuk informasi yang sangat dibutuhkan dalam sekolah menengah kejuruan adalah ketersediaan informasi terkait dunia kerja. Sesuai dengan tujuan pendidikan kejuruan itu sendiri, seharusnya informasi terkait dunia kerja menjadi hal yang wajib dimiliki oleh sekolah. Dimana informasi tersebut dapat bermanfaat bagi siswa terutama lulusan yang membutuhkan hal tersebut.

Informasi tentang dunia pekerjaan yang mencakup semua data mengenai jenis-jenis pekerjaan yang ada di masyarakat (*field occupation*), mengenai posisi dalam suatu pekerjaan (*level of occupation*), mengenai persyaratan tahap dan jenis pendidikan, mengenai sistem klarifikasi jabatan, dan mengenai prospek ke depan berkaitan dengan kebutuhan riil masyarakat akan jenis pekerjaan tertentu (Winkel dan Hastuti, 2007: 319). Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa informasi tentang dunia industri memiliki beberapa tujuan agar suatu hal yang disampaikan dapat dipahami oleh penerima informasi seperti jenis pekerjaan, posisi pekerjaan, persyaratan tahap yang dibuat perusahaan, penawaran perusahaan, prospek jabatan serta kualifikasi pekerjaan berdasarkan jenis pendidikan. Dimana hal tersebut menciptakan informasi

yang dapat diterima dengan baik serta tidak memberikan kesan informasi yang keliru dan salah.

Sebagaimana disebutkan di Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2013 tentang Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Ketenagakerjaan:

“informasi ketenagakerjaan meliputi informasi mengenai penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja.”

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa peran pemerintah melalui kementerian ketenagakerjaan menetapkan standar bagi perusahaan dalam memberikan informasi terkait ketenagakerjaan sehingga masyarakat dapat memilih pekerjaan sesuai dengan minat dan keahliannya.

Rekrutmen pegawai adalah tindakan atau proses dari suatu usaha organisasi untuk mendapatkan tambahan pegawai untuk tujuan operasional, serta penarikan pegawai melibatkan sumber daya manusia yang mampu berfungsi sebagai input lembaga, (Sikula, 1981:183). Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penarikan pegawai merupakan langkah bagi sebuah perusahaan dalam menemukan calon pegawai perusahaan yang berkualitas serta melengkapi kebutuhan perusahaan itu sendiri.

3. Pengelolaan

Menurut KBBI *online* pengelolaan berasal dari kata dasar kelola yang memiliki arti kendali. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Arikunto (1989)

mengemukakan bahwa: “Pengelolaan sama pengertiannya dengan manajemen yaitu pengurusan”. Pendapat ini diperkuat oleh Pidarta (1988) bahwa manajemen mengandung pengertian: mengelola.

Berdasarkan dua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan mengandung pengertian yang sama dengan manajemen. Jadi pengelolaan dapat diartikan sebagai cara untuk mengurus atau menyelenggarakan sesuatu.

Alumni menurut KBBI *online* adalah orang-orang yang telah mengikuti atau tamat dari suatu sekolah atau perguruan tinggi. Berdasarkan pengertian tersebut maka pengelolaan alumni dapat diartikan sebagai suatu proses memberikan pengawasan terhadap orang-orang yang dinyatakan lulus dari lembaga pendidikan. Pengelolaan dalam konteks ini dilaksanakan untuk mengatur dan membimbing alumni agar dapat terserap ke dunia industri yang tepat dan sesuai dengan minat, bakat, dan keterampilan yang dimilikinya.

4. Bursa Kerja Khusus (BKK)

Bursa kerja merupakan suatu lembaga yang didirikan untuk merekrut tenaga kerja baru, serta mendistribusikan ke DU/DI sesuai dengan hasil kesepakatan dengan DU/DI.

Depnakertrans RI, Dirjen Binapenta yang dikutip oleh Sriati (2012) menyatakan bahwa “Bursa Kerja adalah lembaga yang menjalankan fungsi penempatan untuk mempertemukan antara pencari kerja dengan pekerjaan baik dalam hubungan kerja maupun diluar hubungan”.

Berdasarkan tujuan untuk mempertemukan antara pencari kerja dengan dunia industri dan memadai dalam informasi dunia kerja maka dibentuklah bursa kerja dalam lingkup lembaga pendidikan, yaitu Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK.

Depnakertrans RI, Dirjen Binapenta yang dikutip oleh Sriati (2012) menyatakan bahwa “Bursa Kerja Khusus adalah Bursa Kerja di Satuan Pendidikan Menengah, di Satuan Pendidikan Tinggi dan di Lembaga kerja, berfungsi sebagai wadah pendaftaran pencari kerja, memberi penyuluhan dan bimbingan jabatan serta penyaluran dan penempatan pencari kerja”.

Izin penyelenggaraan BKK di tingkat pendidikan menengah merupakan kebijakan pemerintah dalam memberikan informasi dunia kerja secara tepat sasaran dengan sumber daya manusia (SDM), yaitu lulusan maupun calon lulusan SMK sebagai calon tenaga kerja. Hal ini diharapkan mampu mempermudah lulusan SMK dalam memasuki dunia industri karena informasi tentang lowongan kerja lebih mudah terakses dengan adanya program oleh BKK.

Menurut Aris Witono (2012: 5) penyelenggaraan dan pengembangan bursa kerja khusus di SMK mempunyai tujuan, diantaranya:

- 1) Sebagai wadah dalam mempertemukan tamatan dengan pencari kerja
- 2) Memberikan layanan kepada lulusan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing seksi yang ada dalam BKK
- 3) Sebagai wadah dalam pelatihan bagi lulusan yang sesuai dengan permintaan industri
- 4) Sebagai wadah untuk menanamkan jiwa wirausaha bagi lulusan melalui pelatihan

kewirausahaan.

Menurut Buku Panduan Sistem Pusat Karir dalam Hardiani (2017: 12) menjelaskan bahwa fungsi BKK yaitu:

- 1) Memfasilitasi pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaannya sesuai dengan bakat, minat dan keterampilannya
- 2) Membantu perusahaan pengguna tenaga kerja untuk menyediakan dan mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas, terampil, dan profesional
- 3) Melaksanakan rekrutmen tenaga kerja melalui bursa kerja
- 4) Mengurangi angka pengangguran melalui peningkatan penempatan tenaga kerja.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi dari BKK adalah memberikan fasilitas bagi para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan termasuk memberikan informasi lowongan kerja kepada siswa dan alumni dalam aspek mendasar yaitu menyampaikan informasi sesuai kualifikasi jabatan dan kompetensi yang disyaratkan hingga aspek mendalam yaitu memberikan bimbingan dalam pengembangan dan penyempurnaan karir siswa dan lulusannya bekerjasama dengan unit bimbingan konseling.

Menurut Depnakertrans RI Dirjen Binapenta yang dikutip oleh Tegar Prakoso (2012) dalam kegiatannya, Bursa Kerja Khusus harus memperhatikan dasar-dasar hukumnya, yaitu:

- 1) Undang-undang No.14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja

- 2) Undang-undang No.7 Tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan
 - 3) Keputusan presiden RI No.4 tahun 1980 tentang wajib lapor lowongan pekerjaan
 - 4) Keputusan menaker No. Kep-207/MEN/1990 tentang sistem antar kerja
 - 5) Perjanjian kerjasama antara Depdikbud dan Depnaker No.076/U/1993 dan Kep-215/MEN/1993 tentang pembentukan Bursa Kerja di satuan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi
 - 6) Keputusan bersama Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud dan Dirjen Binapenta Depnaker No. 009/C/KEP/U/1994 dan KEP. 02/BP/1994 tentang Pembentukan Bursa Kerja di satuan pendidikan menengah dan pemanduan penyelenggaraan bursa kerja.
 - 7) Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah
 - 8) Peraturan Menaker No.PER-203/MEN/1999 tentang penempatan tenaga kerja di dalam negeri
 - 9) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.kep/23/men/2001 tentang tata kerja dan struktur organisasi departemen tenaga kerja dan transmigrasi
 - 10) Keputusan direktur jendral pembinaan dan penempatan kerja dalam negeri no.KEP-49/D.PPTKDN/VI/2003 tentang petunjuk teknis bursa kerja khusus
- Berdasarkan pedoman dasar hukum tersebut, maka BKK dapat melaksanakan aktivitasnya secara sistematis dan terarah, mulai dari perencanaan, pengelolaan sampai evaluasi.

Menurut Arif Witono (2012: 6) mengatakan bahwa peranan bursa kerja khusus sangat penting bagi calon lulusan maupun lulusan SMK dalam mengenalkan tentang dunia industri. Adapun dalam rangka melaksanakan peran atau kegiatan antar kerja tersebut, dapat dilihat dari ruang lingkup yang dilakukan oleh bursa kerja khusus sebagai berikut:

- 1) Pendaftaran dan pendataan pencari kerja yang telah menyelesaikan pendidikan/pelatihannya.
- 2) Pendataan lowongan kesempatan kerja.

Pemberian bimbingan kepada pencari kerja lulusan untuk mengetahui bakat, minat dan kemampuannya sesuai kebutuhan pengguna tenaga kerja atau untuk berusaha mandiri

- 3) Penawaran kepada pengguna tenaga kerja mengenai persediaan tenaga kerja
- 4) Pelaksanaan verifikasi sebagai tindak lanjut dari pengiriman tenaga kerja yang telah dilakukan
- 5) Pelaksanaan kegiatan pameran bursa kerja (*job fair*) dan sejenisnya. (Keputusan Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja, 2004:9-10)

Menurut Nirmala Yoga (2014) mengatakan bahwa tolak ukur dari keberhasilan dari program penyelenggaraan BKK dapat dilihat dari ketercapaian dari tujuan-tujuan yang ditetapkan dan mengaplikasian BKK. Indikator keberhasilan BKK terdapat beberapa hal yaitu :

- 1) Pemenuhan kelengkapan perizinan dan legalitas. Program ini keberhasilannya dapat diindikasikan dengan adanya SK dari kepala sekolah dan terbitnya surat ijin

dari Depnaker

- 2) Kelengkapan fasilitas BKK, merupakan program yang bertujuan untuk melengkapi fasilitas fisik BKK untuk memperlancar kegiatannya seperti misalnya, kelengkapan ruangan, meja, kursi, alat tulis dan sebagainya
- 3) Pendaftaran alumni lulusan SMK. Diindikasikan dengan tersedianya data tentang nama dan alamat lengkap dari lulusan yang dipergunakan untuk perektrutan calon tenaga kerja ketika ada lowongan atau kesempatan kerja yang ditawarkan melalui BKK.
- 4) Kunjungan dan penawaran kerjasama ke DU/DI. Diindikasikan dengan banyaknya jumlah industri yang mau bekerjasama dengan BKK SMK dari seluruh industri yang dikunjungi.
- 5) Pengiriman/penyaluran lulusan ke dunia kerja, indikasi keberhasilan program ini dapat diketahui dengan banyaknya lulusan atau alumni SMK tersebut yang dapat tersalur ke dunia kerja melalui BKK.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui dampak keberhasilan program Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK, harus memenuhi beberapa persyaratan sesuai dengan beberapa hal yang dijelaskan diatas.

Berikut adalah struktur organisasi BKK yang didirikan di SMK menurut Dirjen Binapenta dalam Negeri (2013: 14).



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi BKK

5. Manajemen BKK

Di bawah ini adalah uraian tentang fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh G.R Terry :

a. Perencanaan (planning)

Menurut Terry (2000), perencanaan adalah suatu keharusan dalam setiap usaha untuk mengembangkan usaha atau mengembangkan lembaga tersebut. Karena perencanaan bersifat vital, seharusnya hal itu dibuat lebih awal. Perencanaan dapat dianggap sebagai suatu kumpulan keputusan-keputusan, dalam hubungan mana perencanaan tersebut dianggap sebagai tindakan untuk mempersiapkan tindakan-tindakan untuk masa yang akan datang dengan jalan membuat keputusan sekarang.

Terry menyatakan bahwa fungsi perencanaan meliputi menetapkan tujuan organisasi, menetapkan suatu strategi keseluruhan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan suatu hirarki rencana yang menyeluruh untuk memadukan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan. Secara lebih terinci, Suharsimi (2008:9) mengemukakan penjelasan perencanaan dari masing-masing fungsi adalah sebagai berikut: Perencanaan adalah proses mempersiapkan serangkaian pengambilan keputusan untuk dilakukannya tindakan dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan atau tanpa menggunakan sumber-sumber yang ada. Aspek-aspek perencanaan meliputi: (1) apa yang akan dilakukan, (2) siapa yang harus melakukan, (3) kapan dilakukan, (4) dimana dilakukan, (5) bagaimana melakukan, dan (6) apa saja yang perlu dilakukan agar tercapai tujuannya secara maksimal.

Dari pengertian di atas bahwa fungsi perencanaan adalah aktifitas atau kegiatan yang berupa proses penentuan program kerja. Disinilah peran BKK sebagai penggerak dan penyelenggara manajemen penyaluran lulusan sangat dibutuhkan. Dalam perencanaan pendidikan di sekolah. Dalam penelitian ini teori manajemen perencanaan G.R Terry di pakai untuk mengetahui bagaimana perencanaan atau proses penentuan program kerja tentang BKK di sekolah.

b. Pengorganisasian (organizing)

Suharsimi (2008: 10) menyatakan bahwa pengorganisasian adalah usaha untuk mewujudkan kerjasama antar manusia yang terlibat kerjasama. Suatu keseluruhan proses pengelompokan orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab atau wewenang

sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan. Pada pokoknya pengorganisasian adalah proses pembagian kerja, sistem kerja sama, sistem hubungan antar personal yang terlibat dalam suatu organisasi.

Menurut Suharsimi (2008:11) pengorganisasian adalah pembagian tugas atau pekerjaan, pembidangan, pengunitan, yaitu: macam dan jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan, banyaknya orang yang terlibat dalam organisasi, dan kemampuan, minat, bakat yang berbeda terhadap pekerjaan.

Adapun manfaat adanya pembagian tugas adalah: (1) spesialisasi dalam melaksanakan tugas, (2) memudahkan koordinasi, dan (3) dapat meningkatkan efektivitas kerja. Pembidangan, pengunitan dan pembagian tugas akan melahirkan sebuah susunan kesatuan-kesatuan kecil yang membentuk satu kesatuan besar dan dikenal dengan nama struktur organisasi yang menggambarkan posisi setiap unit yang menunjukkan keseluruhan dengan bagian-bagiannya.

Hasil dari proses pengorganisasian adalah suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang bulat, karena organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan. Prinsip dari suatu organisasi terdiri dari: (1) adanya suatu pekerjaan yang harus dilakukan, (2) adanya tempat untuk bekerja, (3) terdapat hubungan antara unsur didalam organisasi tersebut, sehingga keuntungan akan didapat dari pelaksanaan sebuah organisasi yaitu: (1) setiap orang dalam organisasi dapat mengetahui kegiatan yang harus dikerjakan, (2) hubungan kerja dapat terlihat jelas, (3) hubungan yang tepat

antara kegiatan dan individu yang melaksanakan dapat tercapai, dan (4) adanya manfaat yang lebih efektif bagi personil dan fasilitas.

Jadi yang dimaksud pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, hingga mereka dapat bekerjasama secara efisien dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Maka pengelola BKK sebagai penggerak dan penyelenggara BKK bersama kepala sekolah melaksanakan proses pengorganisasian untuk mencapai tujuan BKK. Dalam penelitian ini teori manajemen pengorganisasian G.R Terry di pakai untuk mengetahui bagaimana pengorganisasian BKK

c. Penggerakan/ Pelaksanaan (Actuating)

Rangkaian tindakan atau program kerja yang telah ditentukan pada tahap perencanaan kemudian diimplementasikan dalam kegiatan pelaksanaan. Menggerakkan adalah sama artinya dengan pelaksanaan.

Pelaksanaan adalah proses dilakukan dan digerakkannya perencanaan. Fungsi pelaksanaan merupakan proses manajemen untuk merealisasikan hal-hal yang telah disusun dalam fungsi perencanaan. Menurut Terry (2000: 20), actuating adalah usaha untuk menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam suatu lembaga, kalau hanya ada perencanaan atau organisasi saja tidak cukup. Untuk itu dibutuhkan tindakan atau actuating yang konkret yang dapat menimbulkan action. Hal dasar bagi tindakan menggerakkan adalah manajemen yang berpandangan progresif. Maksudnya adalah para pengelola harus menunjukkan melalui kelakuan dan keputusan-keputusan mereka bahwa mereka mempunyai perhatian yang dalam untuk anggota-anggota organisasi mereka.

Pada dasarnya actuating dimulai dari dalam diri pribadi masing-masing. Pengelola harus dimotivasi secara pribadi untuk mencapai kemajuan dan untuk bekerjasama secara harmonis dan terarah dengan pihak lain, karena apabila tidak demikian halnya, tidak mungkin untuk menggerakkan pihak lain. Memang harus diakui bahwa sulit sekali untuk menggerakkan diri sendiri. Untuk mencapai sukses terbesar dalam actuating, orang senantiasa harus bersikap obyektif dalam penentuan dan penggunaannya. Actuating berhubungan erat dengan sumber daya manusia yang pada akhirnya merupakan pusat aktivitas-aktivitas jalannya manajemen. Menggerakkan menimbulkan tantangan dan daya pikat yang luar biasa. Nilai-nilai, sikap, harapan, kebutuhan, ambisi, kepuasan seseorang dalam interaksinya dengan orang lain dan dengan lingkungan fisik kesemuanya bertautan dengan proses menggerakkan.

d. Pengawasan (controlling)

Fungsi terakhir yang dijalankan oleh para manajer adalah controlling. Setelah tujuan-tujuan ditetapkan, rencana-rencana dirumuskan, pengaturan struktural

digambarkan, dan orang-orang dipekerjakan, dilatih, dan dimotivasi masih ada kemungkinan bahwa ada sesuatu yang keliru. Untuk memastikan bahwa semua urusan berjalan seperti seharusnya, manajemen harus memantau kinerja organisasi. Kinerja yang sebenarnya harus dibandingkan dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Jika terdapat penyimpangan yang cukup berarti, tugas manajemen untuk mengembalikan organisasi itu pada jalurnya. Pemantauan, pembandingan, dan kemungkinan mengoreksi inilah yang diartikan dengan fungsi controlling/pengawasan.

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Pambayun (2014) dengan judul “Kinerja Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK Negeri Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa di Kabupaten Sleman”. Penelitian ini adalah penelitian evaluasi dengan model *discrepancy*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja BKK ditinjau dari dimensi input secara umum masuk dalam kategori rendah dengan kesenjangan antara rata-rata skor kinerja dari seluruh BKK dengan skor maksimum sebesar 58,12%. Ditinjau dari dimensi proses, secara umum masuk dalam kategori rendah dengan kesenjangan antara rata-rata skor kinerja dari seluruh BKK dengan skor maksimum sebesar 51.71% (*discrepancy* tinggi). Ditinjau dari dimensi *output*, secara umum masuk kategori rendah dengan kesenjangan antara rata-rata skor kinerja dari seluruh BKK dengan skor maksimum sebesar 66,44% (*discrepancy* tinggi).

Penelitian yang dilakukan oleh Triantini (2018) dengan judul “Evaluasi Peran Bursa Kerja Khusus Dalam Penyaluran Lulusan Siswa SMK Negeri 2 Yogyakarta di Dunia Kerja”. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi menggunakan model *discrepancy* dengan analisis datanya menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BKK masih belum maksimal dengan beberapa hambatan yang dialami yaitu SDM pengurus BKK yang berkurang, pelaksanaan tugas yang hanya terfokus pada beberapa pengurus BKK saja, pemanfaatan IT dan pengelolaan administrasi yang terkendala pada SDM.

Penelitian yang dilakukan oleh Bahar (2015) dengan judul “Evaluasi tugas dan fungsi Bursa Kerja Khusus Dalam Membantu Menyalurkan Lulusan Ke Industri Di SMK Negeri 2 Depok”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan teknik pengambilan data dengan menggunakan teknik kuesioner dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) BKK telah menjalankan tugas dalam membantu menyalurkan lulusan cukup baik (68,21) dengan adanya kegiatan dalam menyampaikan informasi dunia kerja, bekerjasama dengan dunia industri, adanya bimbingan karir dsb. (2) Manajemen BKK telah dikelola cukup baik (79,62) dengan menjalankan fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. (3) Ketercapaian BKK dalam membantu menyalurkan lulusan ke industri cukup tinggi (76,56%) dengan adanya dukungan oleh mitra kerjasama di dunia industri yang rutin. (4) Faktor pendukung BKK antara lain: dukungan dari pihak sekolah, Disnakertrans, fasilitas yang memadai, alumni dan dunia industri aktif bekerjasama dengan BKK. (5) Faktor penghambat BKK antara lain: minimnya

lowongan pekerjaan bagi wanita, komunikasi yang kurang dengan alumni yang belum bekerja, lowongan kerja yang tidak sesuai dengan kompetensi, serta pengaruh dari dunia industri yang krisis.

Penelitian yang dilakukan oleh Witono (2012) dengan judul “Pengelolaan Bursa Kerja Khusus Di SMK Negeri 2 Klaten Tahun Ajaran 2010/2011”. Penelitiannya menghasilkan bahwa BKK di SMK Negeri 2 Klaten memiliki sasaran mutu yaitu keterserapan lulusan mencapai 85%, namun yang dapat terserap lulusan sebesar 77,8% dari sebanyak 347 lulusan. Dalam perusahaan rekanan dari luar negeri ditargetkan 2 perusahaan, namun perusahaan luar negeri yang terdata dalam perusahaan rekanan sebanyak 3 perusahaan. Permasalahan dan hambatan yang ditemukan yaitu (1) pengurus BKK merupakan guru aktif mengajar di kelas, (2) alokasi ruangan khusus untuk BKK yang belum ada dan masih bergabung dengan ruang BK, (3) persaingan dengan BKK sekolah lain, (4) beberapa kasus yang membuat hubungan antara BKK SMK dan dunia industri menjadi tidak baik. Kemudian upaya dalam mengatasi masalah dan hambatan tersebut yaitu (1) memberikan dispensasi kepada guru yang bersangkutan, (2) memberikan sekat diruangan agar tidak saling terganggu, (3) memberikan bimbingan yang insentif kepada pengurus yang bertugas menjalin kerjasama dengan perusahaan rekanan, dan (4) menjalin kerjasama dengan BKK di sekolah lain dalam rangka pengadaan calon tenaga kerja.

Dari keempat hasil penelitian terdahulu seperti pemaparan di atas, terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu tentang Bursa

Kerja Khusus (BKK). Akan tetapi dari ketiga penelitian tersebut tidak ada yang benar-benar sama dengan masalah yang akan di teliti.

C. Kerangka Berpikir

Salah satu tolak ukur ukur keberhasilan SMK adalah seberapa besar lulusanya dapat terserap ke dalam dunia pekerjaan. Pada kenyataanya SMK belum bisa dikatakan berhasil jika hanya mengantarkan siswanya mendapatkan ijazah, tetapi ada tindak lanjut setelah lulus yaitu dengan menjembatani lulusan menuju dunia industri melalui berbagai kegiatan salah satunya adalah BKK.

Bursa Kerja Khusus adalah Bursa Kerja di Satuan Pendidikan Menengah, di Satuan Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pelatihan yang melakukan kegiatan memberikan informasi Pasar kerja, pendaftaran pencari kerja, memberi penyuluhan dan bimbingan jabatan serta penyaluran dan penempatan pencari kerja

Dengan demikian BKK sebagai salah satu pihak/lembaga/organisasi pelaksana kerja dapat dikatakan efektif apabila mampu mencapai sasaran dan tujuannya. Dengan kata lain pelaksana tugas dari organisasi tersebut sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Semakin sesuai dengan rencananya organisasi tersebut dikatakan efektif.

D. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan evaluasi tugas dan fungsi BKK di SMK Muh.1 Playen sebagai berikut:

1. Bidang tugas BKK di SMK Muh.1 Playen :
 - a. Apakah tugas BKK dalam memberikan informasi ketenagakerjaan di

lingkungan sekolah?

- b. Apakah tugas BKK dalam membina hubungan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta?
 - c. Apakah tugas BKK dalam menjalankan kegiatan ketenagakerjaan di lingkungan sekolah?
 - d. Apakah tugas BKK dalam membina hubungan dengan alumni?
 - e. Apakah tugas BKK dalam mengadakan bimbingan karir terhadap lulusan?
2. Bidang manajemen BKK SMK Muh.1 Playen :
- a. Bagaimana Perencanaan BKK SMK Muh.1 Playen?
 - b. Bagaimana Pengorganisasian BKK SMK Muh.1 Playen?
 - c. Bagaimana Pelaksanaan BKK SMK Muh.1 Playen?
 - d. Bagaimana Pengawasan BKK SMK Muh.1 Playen?
3. Apa faktor pendukung yang ada dalam pelaksanaan BKK di SMK Muh.1 Playen?
4. Apa faktor penghambat yang ada dalam pelaksanaan BKK di SMK Muh.1 Playen?